

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, yang ditandai dengan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi negara. Keinginan-keinginan masyarakat untuk merubah pola pemerintahan Indonesia adalah upaya untuk memperbaiki sistem politik yang terkenal otoriter, masyarakat menganggap pemerintahan otoriter yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru tidak sejalan dan menimbulkan banyak masalah. Fenomena-fenomena sosial yang muncul mencerminkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat menginginkan adanya reformasi untuk merubah bentuk pemerintahan Indonesia dari berbagai aspek.¹

Gerakan reformasi yang terjadi pada 21 Mei 1998 dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian masuk ke Indonesia.² Gerakan reformasi juga melahirkan sejumlah peristiwa kelam dalam sejarah bangsa. Kerusuhan yang terjadi selama reformasi 1998 telah menciptakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran. Salah satu peristiwa tragis yang masih membekas pada ingatan masyarakat adalah Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat itu empat mahasiswa Universitas Trisakti kehilangan nyawa mereka.

¹ Iqra Pandu Wijaya, "Sejarah Reformasi Indonesia : Tuntutan Rakyat Terhadap Perubahan", *Jurnal Keislaman dan Peradaban*, Vol 18 No 2 / 2024, hlm. 231.

² Udiyo Basuki, "25 Tahun Reformasi : Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia" *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 / 2023, hlm. 2.

Selang sehari, pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, juga meletus serangkaian peristiwa pelanggaran HAM lainnya, yang kemudian dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini banyak membuat warga sipil menjadi korban, kemudian menciptakan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi masyarakat khususnya etnis Tionghoa.³ Masyarakat yang sudah tidak memiliki rasa percaya semakin mendesak Soeharto untuk meninggalkan kursi pemerintahan yang memicu terjadinya reformasi pada tahun 1998, gerakan ini membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat fondasi demokrasi untuk membuka jendela bagi kebebasan yang lebih luas lagi.⁴

Pasca gerakan reformasi 1998, sejumlah perubahan penting mulai terlihat. Salah satunya yaitu meningkatnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya proses demokrasi, agar pemerintah bisa melaksanakan pemilihan umum dan Pilkada secara transparan dan adil.⁵ Selain itu, reformasi juga melahirkan kebebasan pers yang lebih luas. Kebebasan pers juga menjadi salah satu wujud perubahan penting yang terjadi saat reformasi 1998. Dengan adanya kebebasan dan kemerdekaan dalam penyampaian berita membuat tidak ada lagi tembok penghalang yang membatasi penyebaran informasi kepada masyarakat.⁶

Langkah yang dipilih oleh pemerintah untuk kebebasan pers adalah dengan mencabut aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan

³ Tempo, "Kerusuhan Mei 1998, Sejarah kelam Pelanggaran HAM di Indonesia", <https://www.tempo.co>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 22.59.

⁴ Rety Palupi, Gema Irhamdhika dan Uji Sukma Medianti, "Karakteristik Komunikasi Media Massa Pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 10 No 1 / 2023, hlm 1&9.

⁵ Siti Nurhayati dan Amalia Firnanda, "Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi", *Journal of constitutional Law and Governance*, Vol. 3, no. 1 / 2023.

⁶ Rety Palupi, Gema Irhamdhika dan Uji Sukma Medianti, *op.cit.*, hlm 1-9.

penghapusan Departemen Penerangan yang sebelumnya berfungsi sebagai pengawas dan pengendali informasi yang di keluarkan oleh media. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tonggak penting dalam kebebasan pers di Indonesia. Melalui konteks kebebasan pers inilah berbagai media mulai bangkit kembali termasuk media yang sebelumnya pernah dibredel.

Dengan dihapusnya SIUPP perusahaan pers tidak lagi terikat pada prosedur birokratis yang ketat, begitu juga dengan penghapusan Departemen Penerangan membuat kebebasan pers lepas dari belenggu pemerintahan. Kondisi seperti ini membuat media cetak di Indonesia seperti menemukan titik terangnya, media-media cetak yang telah lama di bungkam kembali bisa menyampaikan informasi.⁷ Pada era reformasi, komponen-komponen pers seperti wartawan, reporter, kolonnis, redaktur, dan pengusaha media massa sangat menyambut dengan gembira kebebasan ini. Sudah saatnya bagi pers untuk mencari, menerima, dan mengolah informasi dengan sebebaskan-bebasnya.⁸

Setelah adanya peristiwa ini membuat pers kembali menjalankan fungsi sosial seperti bagaimana semestinya. Reformasi 1998 pun menjadi sorotan utama berbagai media. Salah satu media massa yang ikut andil dalam memberitakan reformasi 1998 adalah Majalah Forum Keadilan. Forum Keadilan memainkan peran penting dalam memberitakan dinamika politik, hukum, dan demokrasi sepanjang 1998.⁹ Forum Keadilan merupakan salah satu produk dari salah satu

⁷ Cahya Dicky Pratama dan Serafica Gischa, "Pers di Era Reformasi", <https://www.kompas.com>, diakses pada 4 Desember 2024, pukul 15.20.

⁸ Djuroto dan Nina Winangsih Syam, "Kontribusi Media Watch Pada kemerdekaan Pers Indonesia di Era Reformasi", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 13 No 2 / 2011, hlm 178-179.

⁹ Devi Febriyanti, "Signifikansi Surat kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 1998", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 4 No 3 / 2016. hlm. 3.

brand terkemuka di Indonesia yang berusia lebih dari 30 tahun. Forum Keadilan telah hadir dan menyajikan beritanya sejak tahun 1988, dengan menyajikan berita berupa artikel, infografis, dan foto. Majalah Forum Keadilan merupakan perusahaan media yang berada di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Graha Atika, Jl. Warung Jati Barat No. 7, RT. 4/RW. 7, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹⁰

Forum keadilan pada masa pra dan awal reformasi berani dalam menyampaikan kritik tajam dibandingkan dengan media lain yang cenderung berhati-hati akibat ancaman pembredelan. Salah satu penyebab keberanian tersebut muncul karena adanya “backing” dari enam personil ABRI, yang membuat Forum Keadilan lebih leluasa menerbitkan laporan kritis terkait isu hukum dan kekuasaan.¹¹ Dibandingkan dengan media seperti Tempo, Majalah Detik, Editor yang saat itu berhasil dibredel oleh pemerintahan, Forum Keadilan menempati posisi unik sebagai majalah berita yang konsisten mengedepankan investigasi, analisis hukum, dan keberpihakannya pada demokrasi.¹²

Majalah Forum Keadilan berbeda dari majalah lainnya karena memiliki fokus utama laporannya pada isu hukum, keadilan, dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya selama era reformasi. Majalah ini menonjol dengan taglinenya “Padat dan memikat”, dengan menyajikan liputan yang kritis terhadap

¹⁰ Forum Keadilan, Tentang Perusahaan, <https://forumkeadilan.com>, diakses pada 28 September 2025, pukul 19.50.

¹¹ Fenty Effendy, *40 Tahun Jadi Wartawan : Karni Ilyas Lahir Untuk Berita*, (Jakarta : Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara) 2012, hlm 222.

¹² Tempo, Kronologi Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Detik 27 tahun Silam, <https://www.tempo.com>, diakses pada 5 Desember 2025, pukul 15.33.

ketidakadilan sosial, HAM, dan hubungan militer dengan sipil.¹³ Terlihat dari keberpihakan liputan pada tahun 1998 terhadap isu-isu sensitif seperti Dwifungsi ABRI, penculikan aktivis, pelanggaran hak asasi manusia, dan tuntutan otonomi daerah.

Majalah ini juga memiliki keunggulan lain karena Forum Keadilan menjadi satu-satunya majalah hukum yang tentunya berbeda dengan koran harian. Bentuk ini memungkinkan penyajian laporan yang lebih mendalam, investigatif, dan analitis dengan ritme terbit dua minggu sekali serta tiras mencapai 50.000 eksemplar. Dengan format artikel, catatan hukum, infografis, dan foto, Forum Keadilan mampu menghadirkan informasi yang tidak hanya lengkap tetapi juga menarik. Perspektif utamanya yang berfokus pada hukum dan demokrasi membuatnya berbeda dari majalah lain yang lebih menekankan sudut pandang politik semata.¹⁴

Media cetak ini menjadi salah satu media yang memiliki komitmen untuk menjadi majalah yang objektif dan independen, dan juga menjadi salah satu majalah alternatif bagi masyarakat yang merasa tidak terwakilkan aspirasinya oleh media mainstream yang cenderung pro pemerintah. Majalah Forum Keadilan mengangkat pemberitaan mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi opini publik.¹⁵ Majalah Forum Keadilan juga berperan penting dalam mengeluarkan pemberitaan mengenai Reformasi Indonesia. Meskipun majalah ini dikenal luas di kalangan masyarakat, perhatian dan penelitian yang mendalam tentang kontribusi

¹³ Forum Keadilan, "Tentang Kami", <https://forumkeadilan.com>, diakses pada 3 Maret 2026, pukul 20.00.

¹⁴ *Ibid.* hlm 173.

¹⁵ Pulung Tri Brata, "Majalah Forum Keadilan : Sejarah, Kontribusi, dan Evolusi di Era Digital", <https://pulung.net>, diakses pada 10 Desember 2024, pukul 20.49.

majalah ini dalam memberitakan Reformasi Indonesia masih tergolong sedikit. Hal ini membuat celah baru yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, penulis juga merasa tertarik melakukan penelitian karena mengingat majalah ini diterbitkan di Jakarta yang menjadi pusat terjadinya Reformasi tahun 1998.¹⁶

Meskipun perannya cukup besar, penelitian mendalam mengenai kontribusi Forum Keadilan dalam memberitakan Reformasi Indonesia masih sangat terbatas. Padahal majalah ini terbit di Jakarta, pusat berlangsungnya gerakan reformasi 1998, sehingga memegang posisi strategis dalam penyebaran informasi terkait dinamika peristiwa tersebut. Berdasarkan kajian sejarah pers dan studi media reformasi, pemilihan Majalah Forum Keadilan sebagai objek penelitian didasarkan pada adanya celah yang belum banyak disentuh oleh karya-karya sebelumnya. Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang pers pada masa reformasi 1998 lebih banyak memusatkan perhatian pada media yang telah banyak dikenal terutama Majalah Tempo.

Secara karakter dan posisi, Forum Keadilan memiliki kekhasan yang membedakannya dari media lain pada masa transisi reformasi. forum Keadilan secara konsisten menempatkan isu hukum dan keadilan sebagai kerangka utama dalam membaca perubahan politik, terutama dalam isu HAM, Dwifungsi ABRI, dan otonomi daerah. Dalam konteks reformasi 1998 di Indonesia, majalah ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang penyampai kritik terhadap institusi negara seperti ABRI dan sebagai media yang

¹⁶ Merdeka.com, *op.cit.*, hlm 3.

secara aktif mendorong wacana supremasi sipil, penegakan hak asasi manusia, serta upaya perbaikan hubungan pusat–daerah.

Namun, peran tersebut belum banyak diposisikan sebagai objek kajian historis yang menelaah bagaimana media membangun makna reformasi melalui narasi yang yang dibangunnya. Dengan demikian, pemilihan Majalah Forum Keadilan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dalam studi sejarah media Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian yang selama ini berfokus pada media besar dan populer, tetapi juga menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana sebuah majalah berbasis isu hukum dan demokrasi mbingkai peristiwa reformasi 1998. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Majalah Forum dan Reformasi 1998 : Kajian Historis Narasi Media Massa”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap pemberitaan yang diterbitkan oleh Majalah Forum mengenai reformasi khususnya masalah-masalah Dwifungsi ABRI, HAM, dan Otonomi Daerah yang terjadi selama tahun 1998. Tulisan ini juga mengkaji bagaimana Majalah Forum memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1998. Majalah Forum Keadilan adalah majalah yang mengedepankan isu keadilan dan demokrasi dengan perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Majalah Forum melakukan *framing* terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode reformasi tahun 1998 seperti isu Dwifungsi ABRI, HAM, dan Otonomi

Daerah. Untuk lebih memfokuskan penelitian maka diajukan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana awal mula berdirinya Majalah Forum Keadilan ?
2. Bagaimana perkembangan narasi Majalah Forum Keadilan tahun 1998 ?
3. Bagaimana analisis narasi Majalah Forum Keadilan tahun 1998 ?

Dengan membatasi ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini yaitu pada tahun 1998 saja, penulis dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana pandangan-pandangan media terhadap Reformasi Indonesia terkhususnya pada Majalah Forum Keadilan. Batasan spasial yang penulis gunakan akan difokuskan pada media cetak yang diterbitkan di Jakarta, terkhususnya Majalah Forum. Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat dari peristiwa Reformasi tahun 1998. Batasan temporal dalam tulisan ini yaitu tahun 1998. Penelitian yang penulis lakukan akan difokuskan pada tahun 1998 karena pada tahun ini terjadinya peristiwa penting di Indonesia, ditandai dengan pergantian rezim dan puncak terjadinya reformasi pada tanggal Mei hingga Desember 1998.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan awal berdirinya Majalah Forum Keadilan dan menguraikan susunan dewan redaksi Majalah Forum Keadilan.
2. Untuk menjelaskan perkembangan narasi-narasi laporan pada Majalah Forum Keadilan tahun 1998.
3. Untuk menganalisis narasi-narasi laporan seputar isu Dwifungsi ABRI, HAM, dan Otonomi Daerah pada Majalah Forum Keadilan tahun 1998.

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan-laporan yang diterbitkan oleh Majalah Forum Keadilan mengenai Dwifungsi ABRI, HAM, dan Otonomi Daerah dan memperluas sumber literatur mengenai bagaimana sebuah media cetak memframing isu-isu yang terjadi dalam proses perubahan sosial dan politik di Indonesia, terkhusus selama masa reformasi. Dengan mengkaji lebih dalam pemberitaan dinamika Reformasi di Indonesia, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan tentang bagaimana media berfungsi sebagai jalan menuju perubahan, tetapi juga menggambarkan bagaimana hubungan yang kompleks antara media, masyarakat, dan kekuasaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami bagaimana narasi media berkontribusi pada pembentukan opini publik.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah kajian dan tulisan telah mengkaji tentang berbagai topik tentang reformasi 1998, termasuk pada analisis mendalam mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang pernah terjadi selama periode 1998. Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian mengenai media massa yang membahas tentang reformasi.

Beberapa karya berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai reformasi 1998 dan media massa, buku pertama yang perlu diketahui adalah karya Dosen dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya yang berjudul "*Potret Media Massa di Indonesia*", buku ini menjelaskan berbagai macam laporan yang terdapat dalam media massa dalam konteks dampaknya bagi masyarakat dan kaitannya dengan regulasi yang berlaku. Dalam bahasan buku ini,

beberapa penulis juga menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Buku ini juga memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap hal yang sebenarnya terjadi di media massa.¹⁷

Karya lainnya yang membahas tentang pers atau media massa ialah karya dari Hamidah Izzatu Laily yang berjudul "*Pers dan Komunikasi di Indonesia : Jurnalisme Pembangunan dalam Pusaran Sejarah*". Buku ini ikut andil menjadi bagian dari upaya memetakan sejarah jurnalisme khas Indonesia, yaitu melalui studi pemikiran tokoh pers Rosihan Anwar. Ada beberapa hal yang menjadi poin dalam buku ini yaitu pemikiran Rosihan Anwar mengenai jurnalisme pembangunan, ekonomi media, dan hakikat kerja jurnalistik.¹⁸

Selain karya berupa buku-buku ada juga beberapa artikel yang dimuat di jurnal-jurnal akademik. Artikel yang berjudul "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya", yang ditulis oleh Dahlan Surbakti salah satunya.¹⁹ Peran dan fungsi pers pasca reformasi atau setelah lahirnya Undang-undang Pers tahun 1999 memperlihatkan perubahan yang signifikan, mengingat beralihnya kekuasaan dari presiden Soeharto yang identik dengan pelaksanaan demokrasi semu, sehingga peran dan fungsi pers tersebut tidak dilaksanakan maksimal termasuk dibatasinya kebebasan pers. Begitupula pada waktu itu jumlah media cetak maupun elektronik betul-betul dibatasi dengan penerbitan SIUPP yang sangat ketat untuk lahirnya media baru, sehingga peran

¹⁷ Rachmat Kriyantono, *Potret Media massa di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press 2013)

¹⁸ Hamidah Izzatu Laily, *Pers dan Komunikasi di Indonesia: Jurnalisme Pembangunan dalam Pusaran Sejarah*, (Malang: Instrans Publishing 2021).

¹⁹ Dahlan Surbakti, "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang,Undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 3 No 12 / 2016.

media cetak khususnya tidak seperti sekarang yang begitu besar perannya dalam penyebaran informasi dan kontrol di masyarakat dan negara.

Devi Febriyanti juga menuangkan ide nya ke dalam artikel yang berjudul “ Signifikansi Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 1998”.

²⁰ Artikel ini membahas tentang terjadinya peristiwa penting yang dinamakan dengan peristiwa Reformasi 1998. Peristiwa yang terjadi menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde baru. Sebelumnya, pemerintah Orde baru telah berkuasa hampir 32 tahun. Pemerintahan Orde Baru sering diwarnai dengan berbagai kasus penculikan dan juga pengekangan terhadap kehidupan pers di tanah air. Setelah terjadinya peristiwa Reformasi 1998, semua itu berubah. Masyarakat bisa hidup dalam kebebasan dimana masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya tanpa harus merasakan ketakutan. Terlihat betapa pentingnya peristiwa reformasi bagi perubahan politik dan pers di Indonesia, mengingat betapa besar signifikansi dari peristiwa reformasi 1998.

Artikel selanjutnya yang membahas mengenai Orde Baru adalah artikel dari Sri Choiriyanti yang berjudul “Peran Media massa dalam Membentuk Opini Publik”.²¹ Artikel ini mengeksplorasi kekuatan strategis media massa sebagai instrumen utama dalam konstruksi realitas sosial dan pembentukan opini publik. Dalam era informasi yang bergerak cepat, media bukan sekadar penyampai berita, melainkan entitas yang mampu mengarahkan pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Sri Choiriyati menyimpulkan bahwa media

²⁰ Devi Febrianti, “Signifikansi Surat kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 1998”. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.4 No.3/2016.

²¹ Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, “ Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Jurnal UNAIR*, Vol 1 No 1/2012.

massa memiliki "pedang bermata dua". Ia bisa menjadi sarana integrasi bangsa dan pencerdasan publik, namun jika tidak dikelola dengan etika komunikasi yang benar, ia berisiko menjadi alat manipulasi opini demi kepentingan kelompok tertentu.²²

Dalam artikel yang berjudul “Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto di Majalah Tempo dan Gatra”, yang ditulis oleh Nur Indah Yogadiasti dan Muzayin Nazaruddin juga merilis hasil dari pemikiran mereka melalui artikel yang diterbitkan pada Oktober 2008 ini .²³ Artikel ini membahas tentang berita sakit hingga wafatnya mantan Presiden Soeharto yang diliput oleh berbagai media cetak dan juga media elektronik. Berita ini menjadi laporan utama dan khusus di berbagai majalah, seperti Gatra dan Tempo. Kedua majalah ini memiliki perhatian khusus terhadap kematian Soeharto. Hal ini terbukti dari edisi khusus tentang Soeharto yang di cetak oleh Majalah Tempo dan 15 halaman berita tentang Soeharto yang diterbitkan oleh Majalah Gatra.

Artikel selanjutnya yang membahas mengenai pers adalah artikel yang berjudul “ Rahasia Terungkap : Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru 1966-1998”, yang ditulis oleh Rizki Maulana, Dina Septiyana, Adelia Fransiska Br. Ginting, Sion Angelica Pardede.²⁴ Artikel ini membahas tentang bagaimana dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru 1966-1998 di

²² Sri Choiriyati, “Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2 No. 2/2015.

²³ Nur Indah Yogadiasti dan Muzayin Nazaruddin, “Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto di Majalah Tempo dan Gatra”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1 / 2008, hlm 71-84.

²⁴ Rizki Maulana, Dina Septiyana, Adelia Fransiska br. Ginting dan Sion Angelca Pardede, “Rahasia Terungkap : Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998)”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol 2 No 2 / 2023.

Indonesia. Keamanan pers pada masa Orde Baru sangat terbatas karena adanya tekanan dan intimidasi dari pemerintah. Hal seperti ini terlihat dari banyaknya kasus penangkapan dan pengasingan wartawan yang meliputi tindakan penyiksaan dan pembunuhan.

Berikutnya artikel yang berjudul “Studi Literatur Riset Sejarah Pers di Indonesia” yang ditulis oleh Lukas Maserona Sarungu, Siswanta Siswanta, dan Yantika Nur Cahyati. Artikel ini membahas tentang Penelitian studi literatur ini menyimpulkan bahwa riset mengenai sejarah pers dan surat kabar di Indonesia masih tergolong lambat, minim, dan kurang populer di kalangan akademisi. Penelitian ini berhasil menyajikan pemetaan lanskap penulisan sejarah pers di Indonesia yang berfungsi sebagai panduan ilmiah. Pemetaan tersebut mengelompokkan riset sejarah pers yang sudah ada ke dalam lima genre utama: Pers Lokal, Organisasi Media, Ideologi dan Propaganda, Sejarah Pers secara Umum, dan Pembredelan Pers.²⁵

Artikel yang berjudul “Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan”, artikel yang ditulis oleh Nur Avifah Dwi Apriliani, Muhamad Chairudin, Supry Hariyanti, Eka Puteri Ramadhanti, dkk ini membahas tentang Kesimpulannya, media massa memiliki hubungan yang erat dan krusial dalam pembentukan opini publik, terutama dalam konteks kewarganegaraan. Peran ini menimbulkan dampak positif dan negatif yang signifikan. Di sisi positif, media massa mampu meningkatkan kesadaran

²⁵ Lukas Maserona Sarungu, dkk, “Studi Literatur Riset Sejarah Pers di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 2/ 2022.

masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam isu kewarganegaraan, meningkatkan transparansi, dan membuka ruang dialog.²⁶

Selanjutnya, artikel karya Indah Sakina dan Doni Hendrik yang berjudul “Perkembangan Media Massa Indonesia: Analisis kekuatan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi”. Artikel ini membahas tentang Perkembangan media massa di Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah menghasilkan perubahan signifikan dalam lanskap demokrasi, menjadikan media sebagai pilar penting demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Media menjalankan peran krusial dalam menyediakan ruang bagi aspirasi publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun demikian, peran strategis media menghadapi sejumlah tantangan, yaitu ketergantungan pada kepentingan politik dan ekonomi pemilik media, disrupsi digital yang pesat, dan banjir informasi tidak terverifikasi (hoaks) melalui media sosial.²⁷

Selain buku dan artikel jurnal, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai reformasi dan media massa, yaitu skripsi yang berjudul “Persepsi Media Cetak terhadap Prabowo Subianto Dalam Masa Perubahan Dari Orde Baru ke Era Reformasi, Suatu Analisa Isi Surat Kabar Kompas, Media Indonesia, dan Republika, Dalam Kasus Penculikan Aktivis Politik”, yang ditulis oleh Yahya Mahmud.²⁸ Skripsi ini membahas pemberitaan pers mengenai keterlibatan

²⁶ Nur Avifah Dwi Apriliani, dkk, “Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan”, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01 No. 02/2022.

²⁷ Indah Sakina dan Doni Hendrik, “Perkembangan Media Massa Indonesia: Analisis Kekuatan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 11 No. 1/2024.

²⁸ Yahya Mahmudi, “Persepsi Media Cetak Terhadap Prabowo Subianto dalam Masa Perubahan dari Orde Baru ke Era Reformasi, Suatu Analisa Isi Surat Kabar Kompas, Media

Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis politik selama transisi dari pemerintahan Orde Baru ke era reformasi. Sebelum reformasi, kebebasan pers sering dilanggar, yang mengakibatkan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan membuat jurnalis enggan melaporkan berita sensitif.

“ Peranan Majalah Suara Aisyiyah (SA) Dalam Pergerakan Perempuan Islam Berkemajuan Tahun 1998-1999”, yang ditulis oleh Asifa Nurlaila juga bisa dijadikan sebagai sumber acuan untuk penelitian yang akan penulis lakukan.²⁹

Skripsi ini membahas peran majalah SA dalam gerakan perempuan Islam yang progresif antara tahun 1998,1999, saat transisi dari Orde Baru ke reformasi. Majalah ini menghasilkan tulisan-tulisan yang menjadi bukti sejarah perjuangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di tengah krisis ekonomi, moral, politik, dan kepercayaan.

Majalah SA menekankan bahwa Islam menghargai perempuan sebagai individu setara dengan laki-laki dan mengangkat banyak tokoh perempuan Muslim yang menunjukkan prestasi dan pengabdian mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan adil. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan tema yang penulis teliti, yang mana skripsi yang ditulis oleh Asifa Nurlaila ini menyoroti Majalah Suara Aisyiyah sebagai suara perempuan dalam konteks perubahan sosial, sementara itu tema yang peneliti angkat adalah mengenai Majalah Forum yang berkontribusi dalam isu-isu yang lebih luas lagi terkait hukum dan demokrasi. Dibalik perbedaannya, kedua penelitian ini juga memiliki

Indonesia, dan Republika, Dalam Kasus Penculikan Aktivis Politik”, *Thesis* (Universitas Indonesia : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2000).

²⁹ Asifa Nurlaila, “Peranan Majalah Suara Aisyiyah (SA) Dalam Pergerakan Perempuan Islam Berkemajuan Tahun 1998-1999”, *Skripsi* (Universitas Siliwangi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2020).

peran yang sama yaitu sama-sama membentuk opini publik dan proses sosial di Indonesia.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan di Kota Medan”, yang ditulis oleh Satia.³⁰ Skripsi Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara ini membahas Secara keseluruhan, penelitian deskriptif mengenai penerapan kebebasan pers oleh wartawan di Kota Medan menyimpulkan bahwa tingkat kebebasan pers yang dirasakan oleh wartawan masih sangat tinggi atau layak. Kebebasan ini dipahami dan diterapkan oleh wartawan, terutama dalam hak mereka untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi, sesuai dengan Undang-Undang Pers. Hasil penelitian juga menyoroti adanya tantangan di mana beberapa wartawan masih ditemukan bertindak tidak profesional, bahkan ada indikasi "premanisme", karena tidak melaksanakan tugas dengan benar.

Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana skripsi ini mencoba menjelaskan tingkat kebebasan pers yang dirasakan oleh wartawan di Medan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menjelaskan peran media dalam membentuk pandangan masyarakat tentang hukum dan demokrasi selama masa reformasi berjalan. Kedua penelitian ini sama-sama berkontribusi besar terhadap pemahaman tentang sejarah dan perkembangan politik di Indonesia.

Dari karya-karya diatas bisa disimpulkan bahwa ada sisi ruang yang dapat dilihat dari Majalah Forum, di mana Majalah Forum sendiri belum banyak dikaji.

³⁰ Satia, “Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan di Kota Medan”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017).

Majalah Forum dari sisi reformasi lebih banyak menjelaskan dari sudut pandang hukum dan demokrasi, hal inilah yang menjadi pembeda antara Majalah Forum Keadilan dengan majalah lainnya.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini tergolong kedalam Media Framing. Konsep Framing ialah bagaimana suatu media memahami dan menandai peristiwa, Framing juga mencakup perspektif dan cara pandang yang digunakan jurnalis dan media ketika menulis pemberitaan.³¹ Pers atau media merupakan pilar keempat demokrasi. Pada awalnya pilar demokrasi hanya Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kemudian pers memperoleh dasaran sebagai salah satu penyangga sistem demokrasi karena perannya yang mampu menghubungkan ketiga unsur tadi dengan masyarakat. Hingga seiring berjalannya waktu pers berperan sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap memikirkan kepentingan rakyat.³²

Pers dan surat kabar tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan, pers dan surat kabar juga hampir selalu berkaitan dengan berita-berita politik.³³ Penelitian ini digolongkan sebagai sejarah pers, karena membahas bagaimana Majalah Forum melihat Reformasi Indonesia dari sudut pandang hukum dan demokrasi. Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Hal ini berarti

³¹ Eriyanto, "Analisis Framing, Cara Media Membentuk Opini Publik?", <https://bakrie.ac.id>, diakses pada 08 Desember 2025, pukul 22.56.

³² Mahdiani Bukamo, "Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi Ditinjau Dari Konsep Kebebasan John Stuart Mill", *Skripsi* (Universitas Gadjah Mada: Fakultas Filsafat, 2021).

³³ Persatuan Wartawan Indonesia, "Sekilas Sejarah Pers", <https://pwisumbar.or.id>, diakses pada 10 Desember 2024, pukul 22.08.

kualitas dan keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada adanya pers yang bebas. Tanpa mendapat dukungan dari kebebasan pers, struktur bangunan demokrasi tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Pers yang bebas berperan penting sebagai pengawas yang kritis dan penyampai informasi kepada publik, sehingga tanpa keberadaan pers upaya untuk mencapai tujuan demokrasi akan terhambat.³⁴

Demokrasi menurut Sidney Hook merupakan pemerintahan yang mana setiap keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritasnya diberikan kepada rakyat. Sedangkan Terry Lynn memberikan pendapat yang berbeda mengenai demokrasi, Lynn mengungkapkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak melalui kompetisi dan kerja sama melalui para wakil yang telah dipilih.³⁵

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan, keduanya saling memiliki keterkaitan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana semua rakyatnya ikut andil dalam proses pengambilan keputusan melalui perwakilan. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang mengedepankan prinsip persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Demokrasi memiliki prinsip hak,

³⁴ Syafriadi, *Hukum Pers dalam ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : Suluh Media 2018)

³⁵ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi : Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama 2023)

kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.³⁶

Pers memiliki kemampuan dalam *agenda setting* dan *teori framing*, yang memungkinkan mereka untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting untuk diperlihatkan kepada publik. Selain itu pers juga lihai dalam memframing berita, untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Teori agenda *setting* menyebutkan bahwa media memberi pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam isu tertentu. Jika media meliput pada suatu peristiwa atau salah satu angle peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik untuk menganggap peristiwa itu penting. Teori agenda *setting* juga mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu mana yang akan menjadi fokus perhatian publik.³⁷

Teori *Framing* atau juga dikenal dengan kerangka media, adalah suatu konsep yang lebih mendalam dan kompleks dibandingkan dengan Teori Agenda *Setting*, yang dimana teori ini berfokus pada bagaimana media membingkai atau menyusun suatu isu, yang nantinya akan mempengaruhi cara pandang publik terhadap isu tersebut, gagasan utama dari Teori *Framing* adalah bahwa cara penyajian suatu informasi dapat mempengaruhi pemaknaan pembaca terhadap peristiwa yang terjadi.³⁸ Dalam Teori *Framing* terdapat analisis *Framing* merupakan cara suatu media memaknai, memahami, dan membingkai peristiwa

³⁶ Ikhwan Nasution dan Icol Dianto, "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi", *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 1 No. 1/2023, hlm 91.

³⁷ Erwan Efendi, Abdilah Taufiqurrohman, Tris Supriadi dan Eki Kuswanda, "Teori Agenda Setting", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No 1/ 2023.

³⁸ Adhimurti Citra Amalia, "Teori Agenda Setting dan Framing dalam media Relations", <https://binus.ac.id>, diakses pada 21 Desember 2024, pukul 01.36.

yang akan diberitakan. Pada dasarnya *Framing* sendiri adalah suatu metode untuk melihat cara suatu media bercerita terhadap peristiwa yang terjadi, cara bercerita yang dilakukan suatu media dapat tergambarkan pada “cara melihat” terhadap realitas yang akan dijadikan berita.

Analisis *Framing* juga merupakan analisis yang dipakai suatu media untuk melihat cara suatu media menkonstruksi realitas.³⁹ Menurut Entman dalam buku Analisis Teks Media karya Alex Sobur mengatakan bahwa framing dapat dilihat dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas, kedua dimensi ini dapat mempertajam *framing* pada suatu berita melalui proses-proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan dari isi beritanya. Sudut pandang wartawan yang akan menentukan fakta yang akan dipilih, ditonjolkan, dan dibuangnya. *Framing* berita pada suatu media pasti melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.⁴⁰

Majalah merupakan salah satu dari jenis media massa. Majalah merupakan sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain untuk memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi, atau fitur lainnya yang menambah keberagaman isi majalah. Majalah terdiri dari sekumpulan kertas cetakan yang disatukan. Tulisan-tulisan yang dimuat di dalam majalah di cetak oleh mesin cetak. Dengan format yang beragam dan konten yang bervariasi,

³⁹ Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, (Yogyakarta : LkiS Group 2011)

⁴⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*, (Bandung PT Remaja Posdakrya 2018)

majalah dapat menjangkau berbagai segmen pembaca, mulai dari isu politik, ekonomi, hingga gaya hidup dan hiburan. Majalah seperti Forum, Detik, dan Tempo bisa menghasilkan narasi, narasi mengenai keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi sudut pandang pembaca.⁴¹

Narasi merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan dan bisa berupa cerita fiksi (imajinasi) atau nonfiksi. Narasi sendiri dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi, memberikan pengetahuan, dan untuk dijadikan hiburan bagi pembaca atau pendengarnya. Selain alasan di atas, narasi juga berfungsi untuk menggambarkan suatu peristiwa, pengalaman, maupun gagasan kepada orang lain berdasarkan perkembangan waktu. Dalam narasi sangat dibutuhkan alur cerita untuk membantu pembaca mengikuti cerita dengan baik, serta untuk memahami makna dari cerita yang disampaikan.⁴² Narasi bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu narasi subjektif dan narasi objektif, pada narasi subjektif, khalayak diajak untuk turut serta menjadi bagian dari cerita, khalayak diajak untuk turut serta terlibat dalam narasi melalui narator.

Sebuah narasi bisa diceritakan berbeda tergantung siapa karakter yang ada dalam narasi yang mana karakter tersebut berposisi sebagai narator. Sedangkan narasi objektif adalah pada narasi ini khalayak ditempatkan berjarak dengan peristiwa dalam narasi, pada narasi objektif khalayak hanya berperan sebagai pengamat atas peristiwa yang tertulis dalam narasi. Narator yang ada pada narasi objektif bukanlah karakter yang diceritakan dalam narasi, tetapi pada narasi

⁴¹ Psikologimania, "Pengertian Majalah", *Jurnal Hasil Riset*, <https://www.ejournal.com>, diakses pada 10 Desember 2024, pukul 22.24.

⁴² Rahma Fiska, "Narasi Adalah : Pengertian, Ciri, Struktur, Jenis, dan Cara Menulis", <https://www.gramedia.com>, diakses pada 14 Januari 2025, pukul 20.00.

objektif narator berperan sebagai orang lain yang menceritakan narasi. Pada narasi berita, narator adalah jurnalis atau pembuat berita, jurnalis adalah orang yang menceritakan sebuah berita melalui media kepada khalayak.⁴³

Narasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu acara atau kejadian dengan urutan waktu. Teks narasi memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya digunakan dalam karya sastra saja tetapi juga sering muncul dalam laporan kejadian, artikel sejarah, atau bahkan dalam pembicaraan sehari-hari.⁴⁴ Menurut Lamudin Finoza, narasi adalah jenis tulisan yang berupaya untuk menceritakan dan menyusun kegiatan manusia dalam suatu peristiwa dengan urutan waktu yang jelas atau dalam sebuah kesatuan tenggang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam narasi terdapat alur cerita yang menceritakan aksi atau perilaku manusia yang dirangkum dengan kronologis dan teratur, sehingga dengan struktur cerita yang logis, pembaca bisa mengamati dan merasakan pengalaman dari peristiwa yang dibaca.⁴⁵

Reformasi menurut KBBI berasal dari kata re-for-ma-si atau perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, dan agama) dalam suatu masyarakat atau negara.⁴⁶ Reformasi menurut para ahli juga memiliki artian yang berbeda-beda, seperti yang digagaskan Sinambela, yang menyebutkan reformasi merupakan suatu perubahan yang kedalamnya cukup terbatas, namun memiliki

⁴³ Eriyanto, *Analisis Naratif (Dasar-Dasar dan Penerapannya Dalam Analisis Teks Berita Media)*, (Jakarta : Kencana Pranada Media 2013)

⁴⁴ Syahrizal Fauzi, Narasi Adalah : Pengertian, Struktur, Ciri-ciri, dan Contohnya, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id>, diakses pada 2 Agustus 2025, pukul 23.42.

⁴⁵ Adinda Putri Hanifa, Elsa Nurdiana Putri dan Sakira Molania Jacky, Kemampuan Menulis Narasi, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.2 No.3/2024, hlm 144.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Reformasi", <https://kbbi.web.id>, diakses pada 12 Desember 2024, pukul 13.33.

keleluasaan yang melibatkan masyarakat. Hal ini akan membuat perubahan yang menjadi sarana penataan ulang masyarakat, cita-cita dan lembaga negara. Menurut Sedarmayanti, reformasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan komprehensif dalam melakukan perubahan pada tata pemerintahan untuk menjadi lebih baik.⁴⁷

Reformasi Indonesia pada tahun 1998 terjadi di tandai dengan lengsernya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei. Reformasi terjadi karena ketidakpuasan dan timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru (Orba). Krisis ekonomi yang saat itu terjadi di Asia dan juga berimbas hingga ke Indonesia, merupakan faktor dari runtuhnya kekuasaan Orba. Hingga mundurnya Soeharto dari kursi kepemimpinan pada 21 Mei 1998 menjadi titik balik pergantian dari era Orde baru menjadi era Reformasi.⁴⁸ Perkembangan teknologi dan pers saat ini sangatlah berkembang, teknologi dan pers sangat bersangkutan karena memiliki sebuah interaksi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam sistem hukum atau dalam hukum politik dan pemerintah.⁴⁹

F. Metode Penelitian dan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, dapat digali

⁴⁷ Ragam Info, "Pengertian Reformasi dan Revolusi Menurut Ahli", <https://kumparan.com>, diakses pada 12 Desember 2024, pukul 13.42.

⁴⁸ Aisyah Yuri Oktavania, "Sejarah Reformasi 1998, Latar Belakang dan Dampaknya", <https://tirto.id>, diakses pada 12 Desember 2024, pukul 13.52.

⁴⁹ Isa Fathul Vaniya, "Pilar demokrasi Indonesia: Bagaimana Negara Ini Bertahan", *Jurnal Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid*.

informasi yang mendalam dan akurat. Penulis mengumpulkan sumber-sumber melalui studi kepustakaan dan sumber-sumber yang sudah tersedia.

Selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen-dokumen media massa berupa foto atau dokumen koleksi pribadi terutama Majalah Forum Keadilan, jumlah laporan yang digunakan 5 laporan Dwifungsi ABRI, 6 laporan HAM, dan 7 laporan Otonomi Daerah. Sumber sekunder bisa berupa buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai sejarah pers dan politik Indonesia khususnya reformasi yang terjadi tahun 1998, artikel jurnal. Penelitian ini akan dilakukan di Padang yang dilaksanakan di Perpustakaan lingkungan Universitas Andalas (Unand) serta melalui koleksi pribadi.

Tahapan kedua yaitu kritik sumber, kritik sumber disebut juga sebagai penilaian atau pengujian terhadap bahan, bahan sumber tersebut dari sudut pandang kenyataan atau kebenarannya semata-mata. Kritik sumber atau *kritisisme* merupakan hal penting dalam metode penelitian sejarah, tidak hanya penting, tetapi juga memiliki ciri khas dari penelitian sejarah.⁵⁰ Tahapan kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kedua jenis kritik sumber ini saling melengkapi dan memastikan bahwa sumber sejarah yang digunakan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi. Kritik intern adalah kritik terhadap isi dari sumber yang telah didapat. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik terhadap sumber fisik dan non fisik yang bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber ini memiliki validitas yang benar.⁵¹ Penelitian ini menggunakan

⁵⁰ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Penulisan)* (DI Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama 2018), hlm 12.

⁵¹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 102.

metode kritik intern. Pada metode kritik penulis akan memilih data dan mengecek kembali semua data baik wawancara maupun sumber dan arsip dari media massa.

Tahapan ketiga adalah interpretasi, interpretasi adalah kegiatan yang menafsirkan peristiwa dan menentukan makna serta keterkaitan dari fakta yang diperoleh, sering disebut juga dengan bias subjektivitas. Tahapan ini disajikan fakta atau bukti sejarah berdasarkan sumber sejarah yang terverifikasi, dilengkapi dengan informasi dari peneliti. Interpretasi ada dua yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan⁵². Analisis dilakukan pada bab 4 yang dibagi menjadi 3 sub bab, pada sub bab Dwifungsi ABRI analisis dilakukan dengan melihat persamaan dari semua laporan yang menganggap Dwifungsi ABRI salah yang berarti memiliki pendapat yang sama atau berbeda, melihat apakah setiap tokoh yang ada dalam laporan anti pemerintah/anti Dwifungsi ABRI, tujuan diterbitkannya laporan, bagaimana peran dari setiap tokoh yang ada pada laporan.

Selanjutnya, pada sub bab kedua yang tentang HAM, penulis menganalisis dengan melihat apakah majalah ini memperhatikan jika ada pembungkaman suara dengan pembungkaman aktivis dan tidak diberikan panggung sehingga terjadi penculikan, siapa saja aktor-aktor sejarahnya, kenapa terjadi penculikan, apa latar belakang terjadinya penculikan menurut Forum Keadilan, dan apa tujuan dari Forum Keadilan menerbitkan laporan mengenai isu HAM ini. Sub bab terakhir penulis melihat kenapa Forum Keadilan mengangkat isu Otonomi Daerah, peran

⁵² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana 2018), hlm. 78-79.

aktor-aktor sejarah yang terlibat, seberapa penting Otonomi ini dilakukan menurut Forum Keadilan dan seberapa urgensinya Otonomi Daerah ini.

Bagaimana gambaran otonomi daerah menurut para tokoh dan wawancara, untuk apa forum keadilan menampilkan wawancara dari tokoh, output dari wawancara ini apa, opini ditulis oleh orang penting yang nantinya memperkuat argumen bahwa otonomi daerah memang harus dilakukan, bandingkan dengan setelah dan sebelum UUD otonomi daerah dikeluarkan apakah daerah tetap sejahtera atau sebaliknya, ataukah karena sudah didapatkan otonomi ini masyarakat menjadi sejahtera menurut Forum Keadilan

Tahapan keempat yang menjadi tahapan terakhir dari metode penelitian adalah Historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan dari sumber data yang diperoleh dengan menguji dan menganalisis rekaman masa lampau. Pada tahap historiografi hasil penelitian disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.⁵³ Pada tahap historiografi ini, penulis akan menyusun tulisan sejarah dengan jelas dan mudah untuk dipahami, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. Tulisan ini akan mengacu pada fokus penelitian dan akan menjadi narasi sejarah yang koheren dan informatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disesuaikan dengan pedoman sistematika penulisan skripsi dari Departemen Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab memfokuskan permasalahan

⁵³ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 32.

tertentu diantara bab yang memiliki keterkaitan dan hubungan, oleh karena itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, berjudul Majalah Forum dan Politik Orde Baru. Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu, sub bab pertama membahas secara mendalam mengenai Sejarah Majalah Forum Keadilan. Sub bab kedua, membahas mengenai susunan dewan redaksi Majalah Forum Keadilan..

Bab III, berjudul Perkembangan Narasi Majalah Forum tahun 1998. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu membahas tentang perkembangan narasi-narasi historis dalam Majalah Forum Keadilan 1998. Sub bab pertama membahas perkembangan narasi Dwifungsi ABRI, sub bab kedua membahas tentang perkembangan narasi HAM, dan sub bab ketiga membahas perkembangan narasi Otonomi Daerah.

Bab IV, berjudul Analisis Narasi Majalah Forum Tahun 1998. Bab ini terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis narasi Dwifungsi ABRI dalam Majalah Forum Keadilan 1998. Sub bab kedua, membahas tentang analisis narasi HAM pada Majalah Forum Keadilan 1998. Sub bab ketiga membahas analisis narasi Otonomi Daerah pada Majalah Forum Keadilan 1998.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

